



Krisis Politik dan Pandangan Ekonomi Menjelang Pemilu 1997

Bryna Rizkinta,^{1*} Ahmad Fauzan Baihaqi,¹ Fauzan Syahru Ramadhan¹

¹Universitas Diponegoro, Indonesia

*brynarizkinta@lecturer.undip.ac.id

Dikirim: 04-10-2024; Direvisi: 18-02-2025; Diterima: 20-02-2025; Diterbitkan: 30-04-2025

Abstrak: Tulisan ini bertujuan menjelaskan bagaimana memahami krisis politik yang terjadi pada Pemilu 1997 dan pandangan ekonomi dan bisnis menjelang pemilu. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang terbagi menjadi pemilihan topik, pengumpulan sumber sejarah atau heuristik, verifikasi sumber sejarah, interpretasi, dan historiografi. Hasil dari penelitian ini adalah Pemilu 1997 menciptakan krisis politik di berbagai daerah di Indonesia seperti Yogyakarta, Banjarmasin, dan Madura dan kekhawatiran ekonomi. Hal tersebut terwujud dengan kekerasan dan perlawanan rakyat yang mengakibatkan korban nyawa akibat ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintah. Situasi ekonomi saat krisis politik menjelang Pemilu 1997 menimbulkan reaksi dari pemerintah, peneliti akademis, dan pengusaha yang menginginkan stabilitas negara. Pada sisi pemerintah, Presiden Soeharto dan akademisi seperti Mari Pangestu optimis terhadap ekonomi menjelang pemilu. Sementara itu, konglomerat Sofyan Wanandi lebih berhati-hati terhadap proses jalannya pemilu. Dapat disimpulkan bahwa kekerasan dan kerusuhan yang terjadi selama kampanye Pemilu 1997 memunculkan beragam pandangan dan wacana mengenai ekonomi nasional dari berbagai elemen.

Kata Kunci: krisis politik; pandangan ekonomi; pemilu

Abstract: This writing aims to explain how to understand the political crisis in the 1997 election and the economic and business views ahead of the elections. This research uses a historical method involving topic selection, collection of historical sources or heuristics, verification of historical sources, interpretation, and historiography. This research shows that 1997 created a political crisis in various regions in Indonesia, such as Yogyakarta, Banjarmasin, and Madura, as well as economic concerns among various elements. This was manifested with violence and people resistance that resulted in loss of life due to people's dissatisfaction with the government. The economic situation during the political crisis leading to the 1997 election caused reactions from the government, academic researchers, and businesspeople who wanted the country's stability. On the government side, President Soeharto and academics such as Mari Pangestu were optimistic regarding the economy ahead of the election. Meanwhile, conglomerate Sofyan Wanandi was more careful about the election process. It can be concluded that the violence and riots during the 1997 election campaign gave rise to various views and discourses regarding the national economy from various elements.

Keywords: economic view; election; political crisis



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Pendahuluan

Pada 21 Mei 1998, Soeharto, presiden terlama Republik Indonesia selama 32 tahun, meninggalkan Istana. Untuk menghindari kerusakan yang lebih besar dalam negara, Soeharto mengumumkan pengundurannya sebagai presiden. Berita kemunduran presiden disambut meriah oleh massa telah melakukan aksi sudah sejak beberapa bulan belakang. Tentu saja

demonstrasi pada 1998 yang salah satunya disebabkan oleh krisis ekonomi yang dimulai pada 1997 bukanlah faktor utama dibalik jatuhnya Soeharto. Mengikuti pendapat RE Elson (2005), krisis ekonomi 1997 tersebut lebih merupakan katalis yang memungkinkan konstelasi luas berbagai faktor, banyak di antaranya merupakan permasalahan-permasalahan yang lama berkembang, untuk menghimpun diri dan membangun tekanan yang begitu besar pada Soeharto sehingga memaksanya turun.

Penyebab umum dari kejatuhan Soeharto menurut Elson, selain daripada praktik korupsi dan manajemen politik adalah ketidakmampuan Orde Baru dalam mengakomodasi kehendak sosial yang dibuat oleh Soeharto sendiri. Ia mengutip pendapat Derek Davies bahwa Indonesia modern yang diciptakan oleh Soeharto tidak akan terus bisa menoleransi oligarki militer (Elson, 2005). Menurut pendapat Retnowati Abdulgani¹, kejatuhan Soeharto tidak hanya dipicu oleh krisis Asia, melainkan juga, disebabkan oleh usianya yang sudah lanjut, pengkhianatan dari pebisnis yang ia bantu, bisnis keluarga yang diekspos, dan terlalu lama berkuasa (Abdulgani-Knapp, 2008).

Bisa dibilang bahwa kejatuhan Soeharto bukanlah kejadian satu malam, melainkan akumulasi dari suatu proses historis yang panjang. Suatu krisis yang sudah dipupuk setelah mendapatkan kekuasaan. Reformasi 1998 merupakan akumulasi dari krisis-krisis sebelumnya di berbagai sistem yang ada dalam tubuh Orde Baru seperti sistem pemilu Orde Baru. Orde Baru menggunakan cara otoritarianisme dalam berkuasa. Hal tersebut bertujuan untuk mempermudah agenda pembangunan ekonomi dan menciptakan stabilitas politik (Yusa' Farchan, 2022). Selama pemilu di bawah Orde Baru pada 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997, sistem pemilu digunakan sebagai alat legitimasi pemerintah dan membangun stabilitas politik dengan Golkar (Golongan Karya) sebagai kendaraannya. Hal tersebut mencerminkan sikap politik otoriter pada masa Orde baru (Rumyati, 2023). Namun berbeda dengan sebelumnya, Pemilu 1997 merupakan pemilu yang paling tidak damai yang dalam sejarah pemilu di masa Orde Baru. Meskipun Golkar mendapatkan jumlah suara lebih besar dibandingkan pemilu sebelumnya, nahasnya Pemilu 1997 ini merupakan Pemilu terakhir bagi rezim Orde Baru. Pada tahun tersebut Indonesia mengalami krisis berkepanjangan dan praktik KKN pejabat pemerintah yang berakibat memburuknya keuangan negara sehingga menciptakan kemarahan bagi masyarakat dan mahasiswa (Majid & Sugitanata, 2021).

Terdapat penelitian sebelumnya terkait krisis politik dan Pemilu 1997, seperti "Gejolak Politik saat Pelaksanaan Pemilu 1997 pada Akhir Pemerintahan Orde Baru" (2021) oleh Hendra Aldi Perdana yang membahas proses pemilu dan pergolakan-pergolakan yang terjadi pada masa pemilu di berbagai daerah. Peristiwa kelam yang juga merupakan bagian dari krisis politik pada Pemilu 1997, yaitu kerusuhan di Banjarmasin atau Jumat Kelabu secara rinci dibahas oleh Husnul Khotimah dalam tulisan "Collective Memory 'Jum'at Kelabu' Di Banjarmasin (Perspektif. Resolusi Konflik Atas Peristiwa 23 May 1997)" (2017). Gejolak-gejolak politik pada masa Pemilu 1997 dari berbagai daerah seperti di Yogyakarta, Aceh, dan Sampang telah di tulis dalam kumpulan tulisan *Kecurangan dan Perlawanan Rakyat dalam Pemilihan Umum 1997* (1999) yang disusun oleh Syamsuddin Haris.

Penulisan ini berusaha untuk melengkapi karya-karya di atas dengan melihat bukan hanya peristiwa-peristiwa krisis politik Pemilu 1997, tetapi juga keresahan dan pandangan ekonomi dan bisnis menjelang Pemilu 1997. Karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana pemilu di Indonesia berjalan serta mengkaji krisis politik menuju Pemilu

¹ Retowati Abdulgani-Knapp adalah anak dari Roeslan Abdulgani, merupakan tokoh penting baik di masa Soekarno dan Orde Baru. Atas inspirasi dari ayahnya tersebut ia menulis buku *Soeharto: The Life and Legacy of Indonesia's Second President*

yang menimbulkan wacana seputar ekonomi dan bisnis yang diungkapkan oleh para pelaku bisnis yang juga kroni Soeharto, para peneliti politik, serta pemerintah.

Metode Penelitian

Metode ini menggunakan metode sejarah yang terdiri dari pemilihan topik, pengumpulan sumber sejarah atau heuristik, kritik sumber sejarah, interpretasi, dan penulisan atau historiografi (Kuntowijoyo, 2013). Sumber-sumber yang digunakan dalam penulisan ini terbagi menjadi dua, sumber primer dan sekunder. Sumber primer yang digunakan antara lain antara lain surat kabar sezaman dan juga artikel ilmiah yang ditulis dan diterbitkan dalam rentang waktu sekitar waktu pemilu, pada 1997. Adapun sumber sekunder yang digunakan adalah penelitian-penelitian terdahulu ataupun historiografi terdahulu terkait sejarah pemilu, dan sejarah Orde Baru secara umum. Dalam mengungkapkan pandangan ekonomi menjelang pemilu 1997, penulis menggunakan pendapat-pendapat dari pelaku ekonomi, pengamat ekonomi, dan pemerintah.

Hasil Penelitian

Memahami Ideologi dan Pemilu Orde Baru

RE Elson dalam buku biografinya, *Soeharto: Sebuah Biografi*, menjelaskan tentang apa yang menjadi landasan ideologi yang dibangun Soeharto dan Orde Barunya. Soeharto melihat bahwa kehidupan ekonomi bergantung pada kestabilan politik negara. Oleh karena itu, demi menjaga stabilitas politik, peran ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) menjadi sangat penting dalam menjaga stabilitas karena berfungsi baik di ruang sosial dan politik. Pada 1996 Soeharto sendiri mengatakan bahwa militer Indonesia bersifat sebagai stabilisator dalam perjuangan bangsa. Kestabilan politik yang berdampak pada keberhasilan pembangunan inilah yang menjadi “ideologi pembangunan” Soeharto yang terus diucapkannya berulang-ulang. Sebagai mantan serdadu 45 atau revolusi nasional, menurutnya perjuangan dalam hal pembangunan adalah perjuangan memberi esensi pada kemerdekaan (Elson, 2005).

Kekuatan politik Angkatan Darat yang keluar sebagai pemenang di dalam perang dingin Indonesia memiliki konsepsi bahwa mereka berniat untuk melakukan modernisasi dan pembangunan. Visi ini menimbulkan perpecahan ketika berkenaan tentang kegiatan partai-partai politik yang telah ada sebelumnya dan pemilihan umum, menciptakan fraksi di dalam Angkatan Darat. Pemilu sendiri menjadi suatu hal yang penting. Hal ini karena dalam stabilitas politik jangka panjang menuntut kerangka politik yang baru, di mana di dalamnya terdapat elemen sipil (Crouch, 1999).

Harold Crouch berpendapat bahwa pada awalnya perwira-perwira Angkatan Darat tidak menghormati politisi-politisi sisa-sisa dari era Soekarno. Mereka dianggap pelindung bagi sebagian masyarakat saja. Para perwira juga tidak berniat untuk memindahkan kekuasaan kepada partai politik. Beberapa di antara perwira senior berpendapat agar kemunculan partai politik sebagai kekuatan signifikan di politik lokal dan nasional harus dicegah dan bahwa Angkatan Darat harus bersandar pada kesatuan aksi massa untuk memperoleh dukungan. Namun, panglima dan komandan daerah serta lokal berpendapat bahwa partai-partai tersebut dapat berpotensi mengumpulkan kekuatan oposisi dari rakyat untuk melawan pemerintah menjadikan partai politik sukar untuk disingkirkan Angkatan Darat (Crouch, 1999). Bisa dilihat bahwa pada awalnya Angkatan Darat segan bertarung melawan partai-partai politik karena akan memunculkan pergolakan dan akan mempersulit Angkatan Darat untuk memelihara keamanan dan ketertiban.

Kelompok dari pihak Angkatan Darat yang menolak partai berkeyakinan bahwa partai-partai tersebut akan melenceng dari tujuan nasional dengan hanya mementingkan kepentingan

sebagian masyarakat saja. Sebaliknya, mereka percaya bahwa para pemimpin-pemimpin Angkatan Darat akan setia dengan program modernisasi dan pembangunan. Menghadirkan partai berarti juga menghadirkan rintangan kepada pemerintah. Namun, keputusan mengenai partai politik dan pemilu berakhir dengan cara yang “moderat” (Crouch, 1999). Usaha untuk menghancurkan partai-partai lama ditempuh dengan jalan perlahan. Mereka lebih memilih untuk mengatur untuk mengalahkan partai-partai tersebut dalam pemilihan 1971. Hal itu terbukti bagaimana mereka “membersihkan” PNI dari dalam, membujuk kelompok Islam dan partai Islam, mengerahkan aparat negara untuk mendukung Golkar dan bahkan membuat sisa-sisa basis massa Partai Komunis Indonesia memilih Golkar (Crouch, 1999). Dengan begitu rezim yang baru berkuasa ini telah menciptakan suatu sistem pemilu yang tidak kompetitif atau *semi competitive election*, yang tujuannya sendiri untuk memenangkan Golkar sebagai perahu bagi rezim penguasa.

Harold Crouch (1999) berpendapat bahwa tujuan diselenggarakannya pemilu oleh pemerintah karena hal tersebut memberikan rasa berperan serta kepada partai-partai di dalam sistem politik dengan tanpa mengancam kekuasaan Angkatan Darat atas pemerintahan yang baru berdiri. Dengan pemilu, pemerintah berharap mendapatkan legitimasi dan di lain pihak partai-partai yang tetap terpecah dapat dikuasai di parlemen. Ia sendiri melihat alasan Soeharto tidak ingin menunda pemilu adalah karena menginginkan legitimasi rakyat atas rezim baru (Crouch, 1999). Keterlibatan militer pada pemilu masa Orde Baru merupakan instrumen bagi rezim penguasa untuk melindungi kekuasaan lewat politik elektoral. Berbagai cara dilakukan militer untuk mendapatkan kemenangan bagi Golkar dalam pemilu selama masa kekuasaan Orde Baru, baik melalui intervensi terhadap partai politik hingga melakukan intimidasi dan kekerasan politik (Yanuarti, 2018). Pada 1973, untuk menciptakan stabilitas politik dilakukan dengan menggabungkan beberapa partai politik dan melakukan pembinaan terhadap partai-partai tersebut. Terdapat tiga partai hasil dari fusi partai-partai politik yang sebelumnya telah ada yaitu, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Indonesia (PDI), dan Golkar (Hidayat, 2018)

Bisa dibilang bahwa rentetan pemilu yang dilakukan oleh Orde Baru bukanlah pemilu yang demokratis. Berbeda dengan negara demokratis, demokrasi ala Orde menghindari prinsip *free and fair*. Pelaksanaan pemilu diatur untuk melanggengkan kekuasaan Orde Baru sendiri. Ketidak demokratisan pemilu Orde Baru tercerminkan dengan dominannya peran pemerintah, pemilu yang tidak berlangsung adil, dan monopoli pemerintah dalam perhitungan suara (Pamungkas, 2009). Golkar, sebagai kendaraan bagi pemerintah menggunakan beberapa strategi untuk melanggengkan kekuasaannya, yaitu dengan melalui militer, birokrasi, organisasi massa, dan kebijakan pemerintah (Nisa dkk., 2017). Soeharto sendiri menggunakan strateginya agar Golkar dapat selalu menang dalam setiap pemilu sehingga dapat memegang kekuasaan selama 32 tahun (Kriswantoni, 2018).

Terdapat pendapat tentang mengapa pemilu yang memakan banyak biaya dan administrasi publik yang akan disibukkan selama lebih dari enam bulan tetap dilaksanakan meskipun pemenangnya sudah ditentukan dari awal. Selain dari pendapat yang benada optimis bahwa pemilu harus diadakan sebagai jaminan untuk pemilu di masa mendatang dan diharapkan bahwa pemilu pada akhirnya akan berkembang menjadi lembaga yang demokratis. N. G. Schulte Nordholt dalam “The Indonesian Election: A National Ritual” (1980) berusaha menjawab hal tersebut dengan mengobservasi dua pemilu yang diselenggarakan di bawah rezim Orde Baru (pada pemilu 1971 dan 1976) dengan pendekatan yang berbeda, ia mengamati bahwa pemilu di Indonesia bagaikan sebuah ritual nasional.

Ia merefleksikannya dengan melihat realitas masyarakat Jawa dan Bali. Menurutnya masyarakat Jawa masih diatur dengan etika dan perilaku eksternal yang diritualkan sampai pada

tingkatan yang cukup besar. Cita-cita akan keharmonisan dan solidaritas yang menjadi prinsip dasar negara Pancasila dan realitas ketegangan serta konflik sehari-hari, memunculkan dualisme bentuk (*form*) dan isi (*content*), perilaku formal dan tindakan konkret. Ia mengatakan, terdapat konformitas eksternal dan individualitas internal. Karena itu, menurutnya, realitas bergerak pada dua tingkatan berbeda. Bagian atas merepresentasikan perilaku ideal, yaitu pemungutan suara langsung, bebas, dan rahasia yang pada kenyataannya terdapat realitas penyuaipan, intimidasi, dan intrik. Pada tingkat realitas bawah, di mana setiap orang yang tertangkap, yang secara etis tidak dibenarkan, tetapi harus tetap disembunyikan. Dengan begitu tidak satu pun dari 1.000 pengaduan dalam pemilu dibawa ke depan hakim (Nordholt, 1980).

Realitas ketegangan dan bentrokan kampanye pemilu “dinafikan” oleh Presiden sesaat setelah pemilu demi realitas yang lebih agung, atas nama persatuan nasional.² Dengan ini, pemilu menjadi sebuah ritual yang bertujuan untuk memulihkan keutuhan masyarakat dan alam yang kacau. Bahwa dengan berakhirnya pemilu, kekacauan harus diselesaikan, dan harus ada rekonsiliasi untuk bersatu membangun negara (Nordholt, 1980). Nordholt, menganggap bahwa pemilu merupakan ritual untuk menyatukan kembali masyarakat yang terpecah-pecah.

Pemilu pada masa Orde Baru memang bisa dibilang lebih menjadi ajang legitimasi pemerintah kembali dari pada menentang kekuasaan. Pengamat politik dari luar negeri, Jacques Bertrand (1997) yang menulis ketika menjelang Pemilu 1997, berpendapat bahwa ia tidak melihat tanda-tanda akan ada perubahan signifikan dalam sistem politik atau kepemimpinan Soeharto. Sebaliknya, Soeharto mampu menunjukkan bahwa ia dan Orde Baru mampu menolak perubahan. Ia juga pesimis bahwa demokrasi akan muncul dalam waktu dekat.

Meskipun begitu, hasrat untuk melawan Orde Baru dan Golkar lewat kotak suara tetap dipegang teguh loyalis partai PPP dan PDI. Hal ini terbukti terdapat bentrokan-bentrokan antar partai ketika pada masa kampanye yang lebih keras daripada pemilu-pemilu sebelumnya. Pada akhirnya dengan menumpuk krisis-krisisnya sendiri, pemilu yang diselenggarakan pada 1997 yang menghasilkan dipilihnya kembali Soeharto sebagai Presiden pada sidang MPR 1998 tidak lagi menjadi alat untuk meligitimasi dan menyatukan rakyat di bawahnya, melainkan malapetaka kekuasaannya.

Kondisi Sosial dan Politik Menjelang Pemilu 1997

Kondisi politik Indonesia menjelang pemilu 1997 semakin memanas terlebih lagi karena terdapat usaha pemerintah melakukan “kudeta” terhadap kepemimpinan Megawati di PDI. Pemerintah mensponsori kongres PDI pada Juni 1996 yang diadakan di Medan oleh kelompok anti-Megawati. Di dalam kongres tersebut Suryadi terpilih menjadi pemimpin partai (Elson, 2005). Tidak hanya diam, pendukung Megawati yang berjumlah ribuan orang berdemonstrasi di Jakarta, mereka menolak keputusan kongres yang didukung pemerintah (Eklöf, 2003). Mereka mengibarkan bendera dan spanduk merah dan banyak juga dari mereka yang menggunakan baju merah yang merupakan warna khas dari PDI meneriakan “bubarkan kongres”.

Di luar stasiun Gambir, militer dan polisi memblokade jalan demonstran, sejumlah orang-orang yang mengenakan pakaian hitam melempari aparat dengan batu, menyebabkan terjadinya

² Ia merefleksikan dari contoh yang diambilnya ketika pelukis Bali, I Gusti Nyoman Lempad meninggal pada 25 April 1978. Di saat yang sama diadakan ritual besar-besaran yang bernama *Panca Wali Krama* yang berlangsung selama lebih dari sebulan. Pada saat *Panca Wali Krama* yang dilakukan sepuluh tahun sekali ini tidak boleh ada kejadian buruk apapun, termasuk kematian. Dengan demikian, sang anak dari pelukis berkata bahwa ayahnya meninggal 9 Mei dan akan dikremasi pada tanggal 12 dan sebelum tanggal 9 sang anak mengatakan bahwa ayahnya “tidur”. Karena itu lah, Schulte Nordholt melihat realitas kematian disangkal demi realitas yang lebih tinggi, yaitu *Panca Wali Krama*.

serangan terhadap demonstran dan huru-hara. Megawati sendiri mengatakan terdapat 70 korban luka-luka dan satu orang meninggal. Ia juga menuduh bahwa pemerintah telah menyisipkan provokator. Setelah itu, Megawati dan para pendukungnya menggelar kegiatan di markas besar PDI di Jalan Diponegoro, ia masih menganggap bahwa ialah yang secara resmi menjadi ketua partai. Pada 26 Juni, Megawati bersama dengan perwakilan dari 30 LSM mengumumkan pembentukan Majelis Rakyat Indonesia (MARI) sebagai organisasi payung. Organisasi ini menuntut reformasi legislatif politik, pemecatan dan adili pengkhianat yang memecah belah orang-orang. Beberapa figur dari MARI adalah aktivis buruh Muchtar Pakpahan, aktivis HAM Johannes Cornelis 'Poncke' Princen, ketua dari partai yang baru lahir PRD, Budiman Soedjatmiko, dan Sukmawati yang merupakan saudari Megawati. Di markas besar PDI, mereka melakukan mimbar bebas, yang menurut *Jakarta Post* merupakan mimbar bebas pertama Indonesia di luar kampus sejak waktu yang lama (Eklöf, 2003).

Keesokan harinya, Jenderal Feisal Tanjung melabeli mimbar bebas tersebut tidak konstitusional dan merupakan suatu usaha kudeta. Pada 27 Juni kekuatan untuk mengusir Megawati dan pendukungnya dimobilisasi. Ratusan pemuda dengan ikat kepala dan kaos merah turun dari truk kuning lalu melempar batu ke markas besar dibarengi dengan teriakan verbal. Meski aparat anti kerusuhan datang, mereka tidak berusaha untuk menghentikan serangan-serangan dari kelompok pendukung kongres Medan. Mereka kemudian berhasil memasuki markas besar dan menyerang kelompok Megawati. Mereka menganggap ini sebagai kemenangan. Tidak lama, serangan balik dari para pendukung Megawati datang dan membesar dengan melakukan perlawanan tandingan dengan melakukan demonstrasi. Namun, polisi yang menjaga tempat tersebut menyerang balik massa hingga terjadi kekacauan. Massa berlarian karena dikejar oleh polisi, berlarian ke arah timur Jalan Diponegoro dan membakar beberapa bus yang diparkir di sana dilanjutkan dengan tindakan-tindakan destruktif lainnya, tetapi pada akhirnya berhasil dipadamkan oleh pihak aparat (Eklöf, 2003).

Menurut Elko dalam *Power and Political Culture in Suharto's Indonesia* Peristiwa 27 Juni menjadi dalih pemerintah untuk menghabisi oposisi-oposisi sayap kiri. Para anggota MARI dari berbagai LSM tersebut diadili atas tindakan subversi. PRD merupakan organisasi yang paling besar terkena dampak tersebut. Partai yang baru berdiri tersebut dilabeli pemerintah sebagai komunis serta menjadi dalang dalam peristiwa tersebut. Pemerintah ingin mengaitkan kekuatan Megawati dan isu-isu komunisme dengan mengatakan bahwa komunis telah menginfiltrasi PDI. Elko juga berpendapat bahwa alasan pemerintah ingin menyingkirkan Megawati karena kekhawatiran pemerintah bahwa PDI yang dipimpin oleh Megawati memiliki popularitas yang cukup besar, terutama di daerah strategis pemilu seperti Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Sebab lainnya adalah karena Megawati kurang mau tunduk kepada pemerintah di MPR, khususnya menyangkut pemilihan presiden. Pada Pemilu 1997 PDI kalah total dan perolehan suaranya turun drastis dibandingkan tahun sebelumnya (Eklöf, 2003).

Setelah peristiwa kekerasan Megawati dan PDI, kekerasan menjalar dari satu kota ke kota lain di seluruh Jawa. Pada Desember puluhan kerusuhan telah terjadi, yang paling terlihat adalah di Jawa Timur, Situbondo, di mana pada bulan Oktober sembilan gereja dibakar dan lima orang tewas. Kemudian pada hari-hari setelah Natal di Tasikmalaya terjadi kerusuhan yang menyebabkan empat orang tewas. Awal Februari 1997 terjadi kerusuhan kembali di Kalimantan Barat di mana orang Dayak dan pendatang Madura terlibat kerusuhan (Bird, 1998). Kekerasan yang bersifat horizontal ini sebenarnya sudah terjadi sejak akhir abad ke-20. Namun pada 1997 konflik-konflik tersebut semakin parah (Yusuf, 2013). Pemilu yang diadakan pada pertengahan tahun pun, adalah manifestasi dari ketidakpuasan rakyat kepada pemerintah.

Krisis Politik Pada Masa Kampanye 1997

Hal yang paling mencolok dari pemilu ini adalah kerusuhan dan kekerasan yang terjadi pada masa kampanye. Kerusuhan dan konflik-konflik sosial yang tersebar di berbagai daerah merupakan ciri dari pemilu 1997. Mereka secara lokalitas membentuk suatu penolakan serta protes terhadap pemerintah. Hal ini diekspresikan oleh golongan Islam tradisional di Jawa di mana untuk menghadapi Pemilu mereka belajar ilmu kebal karena mereka tau akan berhadapan dengan aparat keamanan yang akan menggunakan kekerasan dalam periode kampanye nantinya. Dengan ilmu kebal mereka akan berani berhadapan serta melawan perlakuan kasar oleh para aparat yang berpihak (Yusuf, 2013).

Syamsyuddin Haris (1999) menganalisis tentang dasar penyebab kekacauan yang terjadi pada pemilu 1997. Pertama, menurutnya perlawanan masyarakat lokal menjelang dan sekitar pemilu berkaitan dengan kegagalan format pemilu dan sistem politik yang diciptakan oleh Orde Baru. Kedua, rakyat telah lelah menemukan peluang dalam bidang ekonomi yang dikarenakan tidak adanya perlindungan bagi kelompok kelas ekonomi bawah, sebaliknya pemerintah malah kerap kali melindungi pemodal besar. Ketiga, kerusuhan di berbagai daerah disebabkan oleh lebih dari satu faktor yang saling tumpang tindih. Pada 23 Mei, pada hari terakhir kampanye, di Banjarmasin, diawali ketika terjadi gangguan salat Jum'at di Masjid Noor oleh pendukung partai pemerintah yang tengah melakukan aksi kampanye menyebabkan kemarahan massa menyebar dan terjadi kerusuhan. Peristiwa ini dikenal dengan sebutan Jum'at Kelabu, yang merupakan kerusuhan yang memakan korban jiwa dan fisik dalam sejarah rezim (Khotimah, 2017).

Ketika itu, setelah ibadah Jum'at, massa Golkar yang berkumpul di lapangan Kamboja membuat panggung hiburan yang akan diisi oleh artis-artis. Sekitar dua puluh ribu pendukung Golkar hadir. Namun tiba-tiba saja muncul pasukan massa yang sebagian besar menggunakan atribut PPP di pinggir lapangan Kamboja kemudian menyerang pendukung Golkar hingga membakar 40 sepeda motor dan menghancurkan puluhan mobil. Massa yang tengah marah ini menyebar ke seluruh kota. Gedung DPRD Kalimantan Selatan yang tengah dibangun dihancurkan. Massa setelah itu bergerak ke kantor DPD Golkar dan menyerang 20 satuan tugas keamanan Golkar yang berhasil menyelamatkan diri. Bom molotov dilemparkan ke Hotel Kalimantan, di mana K.H. Hasan Basri yang akan membacakan doa di panggung lapangan Kamboja berada. Hotel ini pun hangus terbakar. Hotel Istana Barito yang digunakan puluhan artis untuk kampanye Golkar dihancurkan, dibarengi dengan penghancuran kantor agen penerbangan Garuda dan Sempati dan kantor-kantor biro perjalanan. Massa yang di luar kendali ini tersebar di mana-mana dengan membawa pedang, samurai, kelewang, mandau, balok kayu, ataupun celurit. Plaza Mitra juga dirusak oleh massa. Satu sedan putih ditabrakkan ke kaca etalase Toy Kids di lantai paling bawah sebelum mobil itu mereka bakar. Api tersebut lantas menyebar ke seluruh area bangunan hingga membakar Plaza Mitra yang berlantaikan empat. Terjadi kematian massal yang berasal dari orang-orang yang berada di Plaza Mitra (Sulistyo, 1999).

Dalam analisisnya, Hermawan Sulistyo (1999) berpendapat bahwa Jum'at Kelabu ini adalah representasi dari hubungan yang hegemonis oleh rezim Orde Baru atas masyarakat. Struktur ini pun sudah ditanam bahkan semenjak Orde Baru berdiri dan makin menguat. Kesenjangan ekonomi pun tercermin dalam kasus ini di rezim yang memihak ke kalangan pelaku bisnis dari kalangan Cina. Dari peristiwa ini diperkirakan jumlah korban yang meninggal dunia sekitar 302 hingga 320. Komnas HAM menyebutkan terdapat enam pelanggaran HAM dalam kasus ini, yaitu pelanggaran terhadap *freedom of frear*, *freedom to property*, *freedom to religion* (karena terdapat rumah ibadah yang dihancurkan), *right to dignity* (terdapat pelecehan di mana korban dipaksa melepaskan pakaiannya, khususnya perempuan),

right to liberty, dan *right not to be tortured* (Sulistyo, 1999). Peristiwa kelam tersebut meninggalkan trauma emosional tersendiri bagi masyarakat Banjarmasin (Rosalina dkk., 2022).

Di Yogyakarta, meskipun kerusuhan tidak terlalu besar, terjadi penyerangan terhadap kantor DPC PPP Kodya oleh pendukung Golkar pada 30 April 1997. Penyerangan ini dilatarbelakangi oleh maraknya kampanye PPP di Yogyakarta yang membuat Golkar geram. Ketika giliran Golkar berkampanye pada 30 April, dengan menggunakan 50 sepeda motor dan dua kendaraan roda empat, mereka melakukan iring-iringan melewati kantor DPC PPP, mengambil batu, dan menyerang kantor DPC PPP. Kampus UII juga diserang oleh pendukung Golkar beberapa hari sebelumnya dan setidaknya terdapat 58 kasus-kasus dalam skala kecil (Salamm & Musin, 1999).

Periode kampanye pada Pemilu 1997 dimulai pada 29 April sampai 23 May dan diregulasi dengan ketat. Terdapat standardisasi seperti simbol-simbol partai, semua kandidat harus mendapat persetujuan sebelumnya, begitu juga dengan pidato kampanye, serta terdapat pelarangan untuk kampanye di luar ruangan. Namun, pelarangan-pelarangan tersebut pada kenyataannya tidak bisa mencegah iringan-iringan di jalanan yang dilakukan oleh pendukung-pendukung partai (Bird, 1998).

Kerusuhan terjadi antara pendukung PPP meletus di beberapa kota di Madura. Menyebabkan kerusakan kendaraan dan bangunan. Beberapa kotak suara pun hilang serta hancur dalam kerusuhan. Pada sore hari 29 Mei di berbagai tempat di Sampang terjadi bentrokan antara massa PPP dengan panitia pemilu. Tidak lama kemudian ribuan massa dari 18 desa berkumpul menuju ke arah kota Sampang, kemudian merusak dan membakar kantor Kecamatan Sampang. Di Tambelangan, 24 rumah dinas guru SD dan kepala sekolah dirusak dan dibakar. Keesokan harinya, pada 30 Mei, pemimpin PPP di Madura menginginkan agar Pemilu diulang di seluruh kabupaten Sampang yang terdiri dari 1.033 TPS. Pada 1 Juni, ketua LPU (Lembaga Pemilihan Umum) sekaligus Menteri Dalam Negeri yaitu Yogie SM, mengatakan bahwa Pemilu akan diulang, tetapi hanya 86 TPS di Sampang dan 35 TPS di Pamekasan. LPU menekankan bahwa mereka mengulangi pemilihan karena kotak suara yang dibakar dan bukan karena tuntutan dari pihak PPP. Pada 2 Juni 1997 PPP menolak keputusan LPU tersebut. Mereka menegaskan untuk mengulang di seluruh Sampang atau tidak usah diulang sama sekali. Pada akhirnya pada 4 Juni tepatnya hari Rabu Pemilu diulang di Sampang namun hanya 65 TPS, lebih sedikit dari rencana mereka di awal tadi, dengan hanya bersaksikan dari pihak Golkar. Golkar sendiri tetap menjadi pemenang di daerah ini (Widjojo & Fawzia Diana, 1999).

Golongan putih atau yang tidak memilih pada Pemilu 1997 meningkat. Hal itu kemungkinan dikarenakan oleh sikap Megawati terhadap pemilu, meskipun ia tidak eksplisit mendukung golput (Eklof, 1997). Di lain pihak, pemerintah sangat menekan agar golput tidak terjadi. Akbar Tanjung (1997), tokoh Golkar dan Menteri Negara Perumahan Rakyat, dalam ceramahnya pada 26 Februari 1997 di IAIN Sunan Gunung Djati mengajak mahasiswa agar tidak golput. Mengatakan bahwa golput adalah "cermin dari sikap masa bodoh dan apatis politik". Bila dilihat hasil Pemilu 1997, ada sekitar 17,1 juta lebih atau mencapai 12,7% warga negara yang tidak menggunakan hak pilihnya dari 124.740.987 yang berhak memilih. Tingkat golput meningkat dari pemilu sebelumnya pada 1992 yang berjumlah 9,8 juta atau 9,08 (Sugianto, 1997).

Pelanggaran yang paling umum pada 1997 ini adalah adanya suara ganda. Banyak aparat sipil mendapat dua kartu pemilu di mana mereka memilih di dua lokasi sekaligus, di daerah rumahnya dan di tempat kerja mereka. Kedua partai non pemerintah sendiri tidak dapat menyediakan saksi pemilu lebih dari 300.000 TPS. Para saksi di TPU sering menjadi korban intimidasi oleh aparat negara dan juga dari pihak militer. Akses untuk perhitungan suara

mereka juga ditolak. Akhirnya mereka tidak dapat menggugat perhitungan suara bila terjadi manipulasi suara. Pada tahun ini, hanya lima pejabat senior pemerintah yang diberikan akses ke database hasil pemilu nasional yang dibuat oleh LPU di Jakarta. Di antara mereka adalah Soeharto dan Harmoko. Tidak ada perwakilan dari PDI dan PPP diberikan izin untuk mengakses *database* (Eklof, 1997).

Pandangan Ekonomi dan Bisnis Menjelang Pemilu

Kondisi ekonomi Indonesia sebelum pertengahan tahun dan Pemilu 1997 terbilang cukup baik. Pertumbuhan GDP hampir 8%, investasi asing sekitar 6 juta dolar, dan inflasi turun sampai 6.6% (Bird, 1998). Cadangan devisa sampai April 1997 pun naik 2,7% mencapai US\$ 20,38 miliar dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya (“Cadangan Devisa Naik 2,7%,” 1997). Rupiah pun dianggap akan tetap stabil, bila situasi kampanye tetap stabil dan tidak memanas sehingga menimbulkan kerusuhan (“Rupiah Tetap Stabil,” 1997). Nilai tukar rupiah relatif stabil tersebut dan bahkan cenderung mengalami apresiasi sebelum pertengahan 1997 mendorong *capital inflow* yang cukup besar ke Indonesia (Goeltom & Zulverdi, 2003).

Menjelang kampanye, kondisi ini ternyata sedikit memengaruhi pasar uang. Minat pelaku pasar terhadap dolar meningkat sehingga menyebabkan posisi rupiah tertekan. Investor asing sendiri lebih memilih sikap untuk menahan diri untuk membeli saham unggulan dan sebagian lagi melepaskannya (“Kampanye Pengaruhi Pasar Uang,” 1997). Namun, situasi perpolitikan tetap memicu keresahan-keresahan ekonomi dan pelaku bisnis menjelang pemilu tetap menjadi pembicaraan dominan. Seperti pertanyaan-pertanyaan mengenai siapa kandidat wakil presiden yang belum jelas turut meresahkan beberapa pihak.

Sofyan Wanandi, salah seorang konglomerat yang sering bertindak sebagai juru bicara konglomerat dan aktivis mahasiswa 66 berpendapat bahwa ketidakpastian dalam dunia bisnis dalam tahun-tahun mendatang tanpa kepastian tentang wakil presiden akan menimbulkan ketidakstabilan. Ia mengatakan bahwa jika stabilitas ekonomi terganggu, maka akan menyebabkan stabilitas nasional terganggu. Wanandi juga berpendapat bahwa stabilitas ekonomi dapat terganggu oleh upaya spekulasi jangka pendek menjelang Pemilu 1997 dan Sidang Umum MPR 1998. Hal tersebut karena tidak adanya kejelasan siapa wakil presiden yang akan berdiri disamping Soeharto (“Sofyan Wanandi: Dunia usaha perlu kejelasan soal Wapres,” 1996). Wakil presiden dan proses suksesi menurutnya cukup krusial di dalam tahun-tahun itu, ia berpandangan, dengan umur Soeharto yang sudah tua, akan “menyelesaikan tugasnya” pada 2003 dan wakil presiden akan menggantikannya sebagai presiden nantinya. Inilah yang ia sebut sebagai “*smooth transfer*” suksesi sehingga kestabilan politik tetap terjaga. Itulah yang menjadi konsen dari pebisnis. (“Sofyan Wanandi: Smooth Transfer dalam Suksesi,” 1997).

Konglomerat ini juga mengemukakan bahwa kerusuhan yang terjadi sejak pertengahan 1996 seperti peristiwa 27 Juli, Tasikmalaya, Sambas, dan Tasikmalaya berpotensi mengganggu iklim investasi dan mengganggu ekonomi nasional. Diwawancarai pada tanggal 1 Januari 1997 dengan tegas mengatakan “kerusuhan seperti itu bukan masalah main-main” meskipun ia menekankan berkomentar sebagai tokoh aktivis 66 (“Berbagai Kerusuhan Bisa Merepotkan Investasi,” 1997). Krisis antara 1996 sampai pemilu 1997 juga menjadi perhatian dari pemerhati ekonomi Mari Pangestu yang juga kepala departemen ekonomi CSIS (Centre for Strategic and International Studies). Ia menyarankan agar para pebisnis tidak cemas dalam menghadapi ketidakpastian menjelang pemilu 1997. Sebab, ia menekankan, bahwa fundamental ekonomi nasional saat ini masih sangat bagus dan akan mampu mengatasi gejolak politik yang sifatnya jangka pendek. Pertumbuhan ekonomi masih akan baik dan bahkan bisa

lebih baik dari 1996 ("Pengamat Ekonomi Mari Pangestu: Penguasa Jangan Cemas Menghadapi Pemilu 1997," 1996).

Berbeda dengan optimisme dari Mari Pangestu, pada akhir 1996, Prof. Jeffrey A Winter dari Northwestern University berpendapat perekonomian Indonesia menjelang dan setelah Pemilu 1997 akan rentan. Ia meramalkan akan terjadi pergeseran pada para konglomerat besar pada tahun 1996. Konglomerat-konglomerat ini yang telah memindahkan modal mereka ke luar negeri akan memicu kemarahan rakyat. Econit Advisory Group sendiri meramalkan bahwa pada tahun 1997 situasi ekonomi diwanasi dengan ketidakpastian ("Jangan-Jangan Ekonomi Kita Bermasalah," 1996).

Hari Darmawan, bos pengusaha ritel Matahari, ketika diwawancarai pada awal 1997 berpendapat bahwa bisnis pada tahun tersebut akan mengalami perlambatan, ia mengatakan "bisnis mulai lesu" yang gejalanya telah terlihat sejak 1996. Namun, menurutnya setelah pemilu pasar akan kembali seperti sebelumnya. Menurut perkiraan, hasil pemilu nanti membuat orang-orang cenderung hati-hati, barulah nanti ketika keadaan sudah tenang kembali, orang-orang akan berfikir untuk berbelanja dan rekreasi ("Wawancara Hari Darmawan: Pemilu Cukup Berpengaruh," 1997).

Dalam menanggapi kampanye yang makin lama makin memunculkan gejolak sosial. Sofyan Wanandi berkomentar "Kampanye yang brutal ini sudah tidak sehat. Jadi tidak mencapai sama sekali makna pesta demokrasi yang kita inginkan". Ia melanjutkan bahwa kampanye yang tengah berjalan tersebut telah mengakibatkan masyarakat ketakutan. ia mengatakan bahwa "Tetapi yang saya lihat di Jakarta, ada kampanye yang malah membuat orang takut keluar rumah, karena takut apa-apa. Malah ada yang menutup toko. ini kan sudah tidak betul, karena bisa merugikan kita semua." Menurutnya, dampak dari kampanye ini secara makro telah menurunkan perekonomian. Ia mencontohkan dengan usaha-usaha yang dikelolanya seperti farmasi dan hotel. Bisnis farmasinya mengalami penurunan pendapatan sebesar 30%. Sementara itu tingkat yang menginap di hotel yang biasanya 70% sampai 80% selama masa kerusuhan kampanye ini turun menjadi 40%. Ia menyimpulkan hal ini disebabkan karena kampanye dan kerusuhan ini berakibat enggannya pengunjung untuk masuk ke Indonesia. Sudwikatmono, salah seorang pengusaha besar, mengharapkan agar pemerintah dapat mengendalikan situasi tersebut agar ekonomi Indonesia tidak terganggu ("Kampanye Kian Brutal, Pengusaha Takut," 1997).

Menanggapi kerusuhan yang marak terjadi akibat kampanye. Presiden Soeharto dalam Temu Nasional Kemitraan Usaha 1997 di Bogor mengaitkan antara situasi perekonomian menjelang pemilu yang meskipun, kampanye yang dilakukan menggelisahkan masyarakat, tetapi menurutnya kondisi ekonomi masih tetap kuat ("Presiden Soeharto tentang Pembangunan: Bukan Rekyasa Soeharto," 1997). Rupiah sendiri menguat ketika berada di masa akhir kampanye. Transaksi pasar uang yang meskipun diwarnai kerusuhan kampanye tetap terlihat stabil. Rupiah menguat sedikit 0,5 poin terhadap dolar. Perdagangan rupiah pada akhir masa kampanye ditutup pada Rp 2.444,12 naik sedikit dibandingkan sebelumnya. Pasar pun terlihat cukup optimis. Terlihat pada penutupan transaksi yang diakhiri dengan 658,522 poin ("Rp Menguat di Akhir Kampanye," 1997).

Sikap dari para pebisnis konglomerat, baik keturunan Cina dan Pribumi, dalam analisis Bertrand, mereka menginginkan lebih banyak liberalisasi ekonomi, tetapi juga ingin tetap mempertahankan peran negara dalam melindungi kepentingan mereka. Pengusaha tersebut mengandalkan negara patrimonial yang kuat sehingga mereka khawatir bahwa demokratisasi dapat mengikis kepentingan mereka (Bertrand, 1997).

Hasil Pemilu 1997

Pemilu diselenggarakan yang diselenggarakan 29 Mei 1997 dimenangkan oleh Golkar. Harmoko sendiri sebulan sebelum pemilu memprediksi partai tersebut akan meraih 70.02 % suara lebih berhasil mencapai targetnya (Singh, 2000). Rencana pemerintah sendiri dalam menghancurkan Megawati dan PDI terbukti berhasil, PDI pada 1997 remuk dan kalah telak. Mereka hanya mendapatkan 3.07% suara dengan 11 kursi, berbeda jauh pada pemilu 1992 di mana PDI mendapatkan 14.89% suara dengan perolehan 56 kursi. Secara umum Golkar memenangkan pemilu dengan 74.51 % suara dengan 325 kursi. PPP mendapatkan 22,43% suara dengan 89 kursi dan PDI mendapatkan 3,06% suara dengan perolehan 11 kursi (Singh, 2000).

Terdapat pendapat bahwa kerusuhan-kerusuhan yang terjadi pada masa kampanye ini disebabkan karena sejak awal, Orde Baru menempatkan diri sebagai institusi yang berpihak dan tidak netral. Koalisi elite militer dan ekonom teknokrat dengan sengaja memosisikan masyarakat di luar proses politik yang berlaku. Melalui birokrasinya, Orde Baru cenderung mendikte aspirasi dari masyarakat luas. Berbagai konflik yang meletus di berbagai daerah tersebut pun erat kaitannya dengan sempitnya ruang publik yang memungkinkan masyarakat mengaktualisasikan aspirasi dan kepentingan politik mereka (Haris, 1999).

Tentu saja pemilu ini menjadi tantangan besar bagi rezim penguasa yang selama masa kampanye dirongrong legitimasinya. Bahkan salah satu dari analisis pengamat politik CSIS, J Kristadi (1997), mengatakan bahwa resistensi rakyat melawan penguasa yang dilakukan dengan berbagai cara tersebut, bila tidak dilakukan langkah-langkah strategis untuk mengembalikan kedudukan dan kewibawaan pemerintah akan mengakibatkan terjadinya anarki sosial. Pemilu ini dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya pada 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, merupakan pemilu paling brutal dan banyak memakan korban. Hampir 400 nyawa melayang akibat kerusuhan dan kecelakaan (Singh, 2000).

Setelah pemilu, krisis politik dan ekonomi yang melanda pada kuartal terakhir tahun 1997 sangat mengikis kepercayaan terhadap Indonesia dan kepemimpinannya. Pada saat yang sama, orang-orang Indonesia dari semua lapisan masyarakat mulai mempertanyakan arah hidup mereka, dan keberanian dan pembangkangan mewarnai wacana publik. Mulai dari seminar-seminar intelektual akademis dan agama hingga lelucon-lelucon kasar di desa-desa. Sikap yang sudah lama tertanam dalam masyarakat, asal bapak senang, mulai terkikis dengan diperparah dengan kesulitan ekonomi yang menyebabkan tabungan habis, harga yang naik, lapangan pekerjaan hilang, dan pemimpin (Soeharto) yang tengah sakit (Bird, 1998).

Kesimpulan

Pemilu 1997 merupakan salah satu gejala dari krisis politik yang akan membawa pada reformasi pada tahun mendatang. Simtom bagi Orde Baru bahwa kekuasaan rezim otoritarian akan mengalami krisis yang lebih besar lagi setelah pertengahan tahun dan memuncak di tahun setelahnya. Kerusuhan pada masa kampanye pada Pemilu 1997 bukan suatu yang tiba-tiba saja terjadi. Sejak Orde Baru menciptakan sistem kampanye mereka pada 1971 mereka sudah menempatkan diri sebagai kekuatan yang menindas. Kerusuhan-kerusuhan menjelang pemilu, khususnya dalam masa kampanye, terjadi di berbagai daerah di Indonesia, seperti Banjarmasin, Yogyakarta, Madura, serta Jakarta. Mungkin yang paling terparah adalah kerusuhan di Banjarmasin atau Jumat Kelabu yang menewaskan ratusan jiwa. Ketegangan-ketegangan dikarenakan ketidakpuasan rakyat banyak terhadap pemerintah Indonesia serta sistem demokrasi yang dijalankan. Krisis politik menjelang pemilu ini mengakibatkan kekhawatiran ekonomi dan bisnis yang salah satunya dilontarkan oleh Wanandi. Meskipun begitu, Mari Pangestu, selaku akademisi dan Presiden Soeharto tetap optimis terhadap situasi politik pada 1997. Opini-opini pelaku bisnis raksasa menjadi menarik karena, mereka yang berada di dalam

puncak piramida ekonomi Indonesia akan langsung merasakan dampaknya bila terdapat disfungsi dalam perpolitikan Indonesia yang dapat memengaruhi kondisi perekonomian negara.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro atas sarana dan prasarana yang telah disediakan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan di Departemen Sejarah yang telah memberikan saran dan masukan dalam penulisan ini, sehingga penulisan ini dapat diselesaikan. Semoga artikel ini bermanfaat.

Daftar Rujukan

- Abdulgani-Knapp, R. (2008). *Soeharto: The Life and Legacy of Indonesia's Second President*. Marshall Cavendish Editions.
- Berbagai Kerusuhan Bisa Merepotkan Investasi*. (1997, Januari 11). Kompas.
- Bertrand, J. (1997). "Business as Usual" in Suharto's Indonesia. *Asian Survey*, 37(5), 441–452. <https://doi.org/10.2307/2645520>
- Bird, J. (1998). Indonesia in 1997: The Tinderbox Year. *Asian Survey*, 38(2), 168–176. <https://doi.org/10.2307/2645675>
- Bisnis Indonesia. *Cadangan Devisa Naik 2,7%*. (1997, Mei 19). Bisnis Indonesia.
- Crouch, H. (1999). *Militer dan Politik di Indonesia*. Pustaka Sinar Harapan.
- Eklöf, S. (1997). The 1997 General Election in Indonesia. *Asian Survey*, 37(12), 1181–1196. <https://doi.org/10.2307/2645765>
- Eklöf, S. (2003). *Power and Political Culture in Suharto's Indonesia The Indonesian: Democratic Party (PDI) and Decline of the New Order (1986–98)*. NIAS Press.
- Elson, R. E. (2005). *Suharto: Sebuah Biografi Politik*. Pustaka Minda Utama.
- Goeltom, M. S., & Zulverdi, D. (2003). Manajemen Nilai Tukar di Indonesia dan Permasalahannya. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 1(2), 69–91. <https://doi.org/10.21098/bemp.v1i2.169>.
- Haris, S. (1999). *Kecurangan dan Perlawanan Rakyat dalam Pemilu 1997*. Yayasan Obor.
- Hidayat, A. (2018). Perkembangan Partai Politik Pada Masa Orde Baru (1966-1998). *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 17(2), 155–164. <https://doi.org/10.21009/jimd.v17i2.9090>.
- Jangan-Jangan Ekonomi Kita Bermasalah*. (1996, November 20). Merdeka.
- Kampanye Kian Brutal, Pengusaha Takut*. (1997, Mei 16). Media Indonesia.
- Kampanye Pengaruhi Pasar Uang*. (1997, Maret 28). Bisnis Indonesia.
- Khotimah, H. (2017). Collective Memory "Jum'at Kelabu" di Banjarmasin (Perspektif Resolusi Konflik Atas Peristiwa 23 May 1997). *Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman*, 16(2), 75. <https://doi.org/10.18592/al-banjari.v16i2.1486>.
- Kristadi, J. (1997, Januari 25). *Memahami Hasil dan Dampak Pemilu 1997*. Tiras.
- Kriswantoni, S. (2018). General Election Implementation in Indonesia's National History in the Order of New and Reform. *Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan dan Humaniora*, 2(2), 31–42. <https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet/article/view/685/446>.

- Kuntowijoyo. (2013). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Tiara Wacana.
- Majid, A., & Sugitanata, A. (2021). Sistem Pemilu Sebagai Wujud Demokrasi di Indonesia: Antara Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi. *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 2(1), 1–21. <https://doi.org/10.24239/qaumiyyah.v2i1.18>
- Nisa, N. I., Naim, N., & Umamah, N. (2017). Strategy of Golongan Karya to be Winner in Election Year 1971-1997. *Jurnal Historica*, 1(1). <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JHIS/article/view/5106>.
- Nordholt, N. (1980). The Indonesian Elections: a National Ritual. In R. Schefold, J. W. Schoorl, & J. Tennekes (Ed.), *Man, Meaning and History* (hlm. 179–203). BRILL. https://doi.org/10.1163/9789004287204_009.
- Pamungkas, S. (2009). *Perihal Pemilu*. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM.
- Pengamat Ekonomi Mari Pangestu: Penguasa Jangan Cemas Menghadapi Pemilu 1997*. (1996, November 14). Merdeka.
- Perdana, H. A. (2021). Gejolak Politik Saat Pelaksanaan Pemilu 1997 Pada Akhir Pemerintahan Orde Baru. *Historiography*, 1(1), 32. <https://doi.org/10.17977/um081v1i12021p32-37>
- Presiden Soeharto tentang Pembangunan: Bukan Rekayasa Soeharto*. (1997, Mei 16). Kompas.
- Rosalina, R., Prawitasari, M., Rochgiyanti, R., & Anis, M. Z. A. (2022). Trauma Emosional yang Dialami Masyarakat Banjar Pasca Peristiwa Jum'at Kelabu. *Prabayaksa: Journal of History Education*, 2(1), 33. <https://doi.org/10.20527/pby.v2i1.5137>
- Rp Menguat di Akhir Kampanye*. (1997, Mei 26). Bisnis Indonesia.
- Rumiyati, R. (2023). Evolusi Sistem Pemilu Masa Orde Baru (1966-1998). *Kala Manca: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 11(1), 23–30. <https://doi.org/10.69744/kamaca.v11i1.203>.
- Rupiah Tetap Stabil*. (1997, Mei 5). Bisnis Indonesia.
- Salamm, A., & Musin, E. B. (1999). Politik Lokal dan Pemilu di Yogyakarta . In S. Haris (Ed.), *Kecurangan dan Perlawanan Rakyat dalam Pemilu 1997*. Yayasan Obor.
- Singh, B. (2000). *Succession Politics in Indonesia: The 1998 Presidential Elections and the Fall of Suharto*. Macmillan Press.
- Sofyan Wanandi. (1996, Desember 6). *Dunia usaha perlu kejelasan soal Wapres*. Bisnis Indonesia.
- Sofyan Wanandi. (1997, Juni 12). *Smooth Transfer dalam Sukses*. Manajemen.
- Sugianto, I. (1997). Pemilu dan Demokratisasi di Indonesia (Catatan Kecil di Seputar Pelaksanaan Pemilu 1997). *Perspektif*, 2(2).
- Sulistyo, H. (1999). *Anarki Enam Jam: Rekonstruksi Kerusuhan Jumat Membara di Banjarmasin. Dalam Kecurangan dan Perlawanan Rakyat dalam Pemilu 1997*. Yayasan Obor.
- Tandjung, A. (1997). Peran Mahasiswa dalam Mensukseskan Pemilu 1997. *ALQALAM*, 11(63), 1. <https://doi.org/10.32678/alqalam.v11i63.474>
- Wawancara Hari Darmawan. (1997, Januari). *Pemilu Cukup Berpengaruh*. GATRA.

- Widjojo, M. S., & Fawzia Diana. (1999). Resistensi Orang Kenek di Sampang, Madura. In *Kecurangan dan Perlawanan Rakyat dalam Pemilu 1997*. Yayasan Obor.
- Yanuarti, S. (2018). Militer dan Pemilu-Pemilu di Indonesia. *Jurnal Penelitian Politik*, 15(2), 233. <https://doi.org/10.14203/jpp.v15i2.764>.
- Yusa' Farchan. (2022). Dinamika Sistem Politik Otoritarianisme Orde Baru. *Jurnal Adhikari*, 1(3), 152–161. <https://doi.org/10.53968/ja.v1i3.41>.
- Yusuf, C. F. (2013). *Konflik Bernuansa Agama: Peta Konflik Berbagai Daerah di Indonesia*. Kementerian Agama Republik Indonesia.